

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

##### 6.1.1. Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterbatasan Kekuasaan, Sebagaimana diketahui bahwa jabatan ketua hanya dimiliki oleh satu nama, sedangkan terdapat dua orang yang ingin menduduki jabatan tersebut, yakni Ade Puspitasari dan Nofel Saleh Hilabi;
2. Prinsip Kesenangan, hal yang wajar terjadi perebutan kekuasaan, karena begitu banyak keuntungan apabila dapat memimpin salah satu partai besar yang ada di Kota Bekasi, Golkar. Maka dari itu, banyak pihak yang ingin mempertahankan dan meningkatkan kenikmatan hidupnya, sehingga apabila terdapat pihak yang berlawanan, para pemegang kekuasaan akan menentang balik;
3. Struktur Partai Golkar yang terdiri dari penguasa dan orang-orang yang sebagai objek kekuasaan mengakibatkan perbedaan persepsi kelompok dari kelompok pendukung terhadap tokoh Ade dan Nofel, di mana keduanya merupakan pihak-pihak yang berkuasa. Kedua kelompok ini sudah terpatriti bahwa *image* lawan itu buruk, sehingga tidak cocok apabila menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi;
4. Ambiguitas Sikap Kepengurusan Golkar Pusat dan Provinsi, ditemukan bahwa ketidak-tegasan, baik dari kepengurusan Golkar tingkat Provinsi dengan Pusat yang seakan membiarkan. Ditambah pernyataan yang

dikeluarkan oleh Golkar Jawa Barat yang dinilai memihak salah satu kubu, semakin memperburuk keadaan di internal partai;

5. Perbedaan Penafsiran Juklak No. 2 Tahun 2020 dari kubu Ade maupun kubu Nofel, sehingga terlaksanalah dua kali Musda dengan klaim ketua yang berbeda;
6. Komunikasi Buruk Antar Pihak terkait Musda V, pihak-pihak yang dimaksud dari Mahkamah Partai dan DPD Golkar Jawa Barat dengan DPD Golkar Kota Bekasi dalam perencanaan dan pasca Musda sehingga memunculkan prasangka buruk terhadap keberpihakan dengan salah satu pihak.

#### **6.2.1. Proses Konsensus**

1. Tahap pertama dimulai dengan proses mediasi yang melibatkan DPD Golkar Jawa Barat yang bertugas membantu tercapainya kompromi antar pihak yang berkonflik atau adanya intervensi dari DPD Golkar Jawa Barat;
2. Tahap kedua melalui proses konsoliasi yang merupakan pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga tertentu sehingga memungkinkan adanya ruang diskusi dan proses pengambilan keputusan di antara para pihak bersengketa. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Partai Golkar;
3. Tahap terakhir dilakukan proses arbitase merupakan upaya yang diselesaikan melalui keputusan peradilan atau pihak ketiga atas konflik yang berlangsung, yaitu melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

## 6.2.Rekomendasi

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi guna keberlanjutan penelitian akademik agar dapat diteliti dalam aspek yang berbeda secara mendalam.

Pertama, penelitian selanjutnya pada studi kasus Konflik Politik DPD Golkar Kota Bekasi dapat memfokuskan pada bagaimana cara kedua pihak yang berkonflik dapat menemukan kesepakatan (konsensus). Misalnya metode atau alternatif apa yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Mengingat dari tahun 2020 sampai 2022, masih belum menemukan titik temu, sehingga diperlukan penelitian secara komprehensif untuk mengetahui akhir dan memahami upaya konsolidasi yang dilakukan dari kasus dualisme ini.

Kedua, seperti yang diketahui bahwa konflik internal partai politik, tentu memberikan dampak. Di dalam hal ini, dampak yang diberikan bukan hanya terhadap DPD Golkar Kota Bekasi, melainkan mempengaruhi sistem komando yang sudah diterapkan oleh partai politik itu sendiri. Dampak yang dialami terhadap DPD Golkar Jawa Barat sebagai pengurus satu tingkat di atasnya dan dampak terhadap Pengurus Golkar Kecamatan sampai Kelurahan di Kota Bekasi. Adapun dampak yang dirasakan oleh Partai Golkar Kota Bekasi sebagai partai politik dalam mempersiapkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di Kota Bekasi.

Ketiga, pasca konflik internal Golkar Kota Bekasi menimbulkan satu pertanyaan tambahan, yakni bagaimana Golkar Kota Bekasi dalam menyusun strategi pemenangan dan menyolidkan pengurus setelah terjadi dualisme kepemimpinan. Pada tahun 2024 menjadi tahun politik, baik tingkat nasional

maupun di wilayah Kota Bekasi. Mengingat di tahun itu, terdapat penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Akan tetapi dikarenakan adanya dua pemimpin dan kepengurusan, tentu berpengaruh terhadap strategi yang diterapkan. Maka dari itu, seyogyanya penelitian selanjutnya dapat membahas hal tersebut setelah konflik berlangsung. Hampir dua tahun lebih juga, Golkar Kota Bekasi bersitegang di antara para kader internalnya, sehingga diperlukan pemahaman terkait upaya seperti apa yang dilakukan dalam mengukuhkan kepengurusan agar semakin solid dan erat.

Demikian rekomendasi akademik yang dapat diberikan oleh peneliti. Besar harapan peneliti apabila terdapat teman-teman dari mahasiswa Ilmu Politik UNAS dapat melanjutkan penelitian tersebut secara lebih mendalam.

